



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 September 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RIKO FEBRIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **487983**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/190 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/130 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 2101 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 160.585.000**

1. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
2.200.000
2. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TX MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 144.000.000
3. MOTOR, HONDA R2/MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
14.385.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 85.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 442.174.125**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 898.259.125**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 898.259.125**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.